**HUBUNGAN DIPLOMASI KEAMANAN INGGRIS DAN UNI EROPA
(UE) PASCA PERNYATAAN REFERENDUM BRITISH EXIT (BREXIT)
TAHUN 2016-2017**

Oleh: Ledi Sanita Tobing

Pembimbing: Dr. M. Saeri, M.Hum.

Bibliography: Official Journals 36, Books 34, Documents and Publications 8, Site
56.

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas, Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru, 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study explains about how the security diplomacy of the United Kingdom and the European Union after the Brexit Referendum (British Exit) conducted by the United Kingdom in 2016-2017. Brexit is carried out by the United Kingdom because the United Kingdom found it was no longer compatible with the European Union policy. This study uses a Neo-realist perspective by Kenneth N. Waltz quoted from his book Theory of International Politics, and supported by diplomatic theory, and the level of analysis of the State. Furthermore, the methodology used in this study is a qualitative research methodology which the data collection techniques uses the literature review method. The results of this study indicate that the United Kingdom needs to conduct broader negotiations after the statement of the Brexit Referendum on foreign policy and security issues, especially in the European region where the European Union is an important player in the European region. And negotiate on how Britain sees, whether British policy is in accordance with EU policy. So that in this case the United Kingdom needs to discuss its security issues in order to remain in line with the European Union, when the United Kingdom has been declared officially out of the European Union

Keywords: Brexit (British Exit), Security Diplomacy, European Union, Negotiation.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan keluarnya Inggris, UE akan kehilangan pemain diplomatik utama dan salah satu dari keduanya, bersama Prancis, negara anggota yang paling mampu secara militer. Untuk Uni Eropa, dampak yang paling cepat dari *Brexit* pada bidang kebijakan luar negeri, keamanan dan pertahanan telah memberikan dorongan gagasan tentang mereformasi kebijakan pertahanan Uni Eropa dan yang telah beredar untuk beberapa waktu.

Dengan uraian tersebut, maka penulis mengangkat persoalan tersebut dengan judul bahasan **“Hubungan Diplomasi Keamanan Inggris Terhadap Uni Eropa (UE) Pasca Pernyataan Referendum British Exit (BREXIT) Tahun 2016-2017”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH **“Bagaimana Hubungan Diplomasi Keamanan Inggris dan Uni Eropa (UE) Pasca Pernyataan Referendum British Exit (Brexit) Pada Tahun 2016-2017?”**

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana dinamika hubungan diplomasi keamanan Inggris dan Uni Eropa sebelum adanya pernyataan referendum *Brexit*.

2. Menganalisis bagaimana hubungan diplomasi keamanan Inggris dan Uni Eropa pasca pernyataan referendum *Brexit*.

1.4 ANGKA DASAR TEORI

1.4.1 Perspektif: Neo-Realisme

Untuk menjelaskan penelitian ini secara maksimal maka penulis akan menggunakan perspektif Neorealisme, pemikiran neorealisme berupaya untuk menyempurnakan kembali realisme klasik dengan menempatkan kembali negara dalam struktur yang penting.¹

Waltz memfokuskan teori hubungan internasional pada struktur sistem, unit-unit yang berinteraksi, kesinambungan, dan perubahan system.² Apabila UE menerapkan suatu kebijakan maka Inggris harus dapat menyesuaikan peraturannya dengan kebijakan yang telah ada tersebut, inilah yang menyebabkan bahwa kebijakan UE tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku negara demi mencapai kepentingan nasionalnya. Inilah salah satu yang menjadi alasan Inggris memilih untuk keluar dari UE

¹Iva Rachmawati, *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: AswajaPressindo, 2012) hal. 89-92.

² Robert Jackson dan George Sorensen. *Introduction to International Relations*, (OxfordUniversity, 1999) hal. 78-82.

agar terlepas dari kebijakan-kebijakan UE yang dirasa mengancam stabilitas keamanan Inggris.

1.4.2 Teori: Diplomasi Publik

Teori yang digunakan adalah teori diplomasi, pada dasarnya diplomasi adalah kajian hubungan internasional dengan dasar teoritikal yang lemah. salah satu cara yang sering dipraktekan untuk mengurangi tekanan konflik adalah dengan diplomasi.³ Holsti menambahkan bahwa negosiasi adalah unsur yang terpenting dalam diplomasi,⁴

1.4.3 Tingkat Analisa: Negara

Tingkat analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisa negara. Tingkat analisis menurut Kenneth, N.Waltz adalah faktor-faktor penjelas.

Tingkat analisis akan membantu penulis untuk menemukan variabel yang mana sangat menentukan tindakan aktor. Terdapat tiga tingkat analisis menurut Waltz. tingkat analisis pertama adalah sistem (*system-level analyse*), bentuk dari sistem internasional dan bagaimana sistem tersebut memengaruhi aktor.⁵

1.4.4 Konsep: Keamanan

Konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah konsep keamanan yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Konsep ini berpandangan bahwa keamanan adalah suatu kemampuan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman yang nyata.⁶

Menurut Buzan, Wæver, dan de Wilde dalam *Security: A New Framework for Analysis*, keamanan yang dimaksud dalam pendekatan ini tidak sebatas pada satu sektor saja, tetapi mencakup:⁷

1. Keamanan militer (*forceful coercion*),
2. Keamanan ekonomi (perdagangan, produksi dan finansial),
3. Keamanan sosial (*collective identity*),
4. Keamanan lingkungan (aktivitas manusia dan *planetary biosphere*).

Isu keamanan yang terjadi antara Inggris dan UE ini merupakan salah satu contoh dari konsep keamanan non-tradisional yang tidak hanya melibatkan militer.

1.5 DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konsepsional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan

³ Holsti, K.J. *Politik Internasional Kerangka untuk analisis*. (Jakarta: Erlangga, 1988) hal. 25-30.

⁴ Ibid, hal. 238

⁵ Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional", *Jurnal Transnasional* (2013): hal. 139.

⁶ Barry Buzan, Ole, W. dan de Wilde, J. *Security: A New Framework For Analysis*. (Boulder: Lynne Rienner, 1998) hal.21-24.

⁷ Barry, Buzan, Op,cit. hal. 95.

dengan istilah-istilah didalam judul penelitian.

1. Brexit
Brexit (Britain Exit) adalah penarikan diri Britania Raya dari UE sebagai hasil dari referendum *Brexit* yang di adakan pada kamis, 23 juni 2016.⁸
2. Diplomasi keamanan (Security Diplomacy)
Diplomasi keamanan merupakan suatu pola diplomasi dengan isu keamanan yang bertujuan melindungi keamanan negara sebagai langkah preventif terhadap ancaman dari negara lain.
3. Referendum
Referendum atau jajak pendapat adalah suatu proses pemungutan suara masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan.⁹

1.6 DEFINISI OPERASIONAL

Adanya *Brexit* ini memberikan pengaruh baik negatif maupun positif, namun secara keseluruhan dampaknya adalah membuat hubungan keamanan

kedua negara itu menjadi tidak kondusif.

Setelah keluarnya dari Uni Eropa, Inggris tidak akan lagi menjadi anggota dari Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Umum (CSDP).¹⁰ negara-negara lain juga cenderung untuk waspada terhadap memberikan Inggris peran formal yang signifikan dalam mekanisme CSDP,¹¹ bahkan jika Inggris yang memintanya.

1.7 METODOLOGI PENELITIAN

1.7.1 Metodologi Penulisan

Penulis menggunakan Metode Kualitatif yang menggali fakta atau fenomena. Metode penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang bertujuan untuk mengungkap fenomena dan memahami makna di balik fenomena tersebut.¹²

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan *Library Research* atau studi kepustakaan, yakni data-data tersebut diperoleh dari *Literature*, seperti buku-buku,

⁸ Hunt, Alex dan Brian Wheelr, "The UK's EU referendum: All you need to know" *BBC News*, <https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887>(diakses pada 11 November 2018)

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan" *KBBI*, <https://kbbi.web.id/referendum> (diakses pada 6 November 2018).

¹⁰Ministry of Defence, "UK Steps Up Measures to Reassure European Allies," *government*, <https://www.gov.uk/government/news/uk-steps-up-measures-to-reassure-european-allies> (diakses pada 22 February 2019).

¹¹ Ibid.,

¹² Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Sosial Humaniora* (2005): hal. 42-47.

situs-situs internet, jurnal, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang terkait.

1.8 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Lingkup dari penelitian ini ialah hubungan diplomasi antara Inggris dan UE karena pada dasarnya penting sekali bagi tiap negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lainnya, untuk mempermudah dalam mencapai cita-cita negara tersebut juga agar politik luar negeri suatu negara tersebut bisa terlaksana.

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I :

Pendahuluan

BAB II : Dinamika Hubungan Inggris dan UE Sebelum Adanya Pernyataan Referendum Brexit.

BAB III : Konsekuensi Yang Harus Di Hadapi Inggris Terhadap Uni Eropa Pasca Referendum Brexit.

BAB IV : Negosiasi Hubungan Diplomasi Keamanan Inggris Dan Uni Eropa Pasca Pernyataan Referendum Brexit.

BAB V : Kesimpulan

BAB II

2.1 Profil Negara Inggris

United Kingdom atau yang sering disebut Inggris merupakan negara kepulauan yang terletak di sebelah timur samudra pasifik, dahulu Inggris berbentuk kerajaan yang menambah wilayahnya

dengan menaklukkan negara lain. Semakin berjalannya waktu wilayah Inggris semakin luas, wilayah yang pertama bergabung adalah Wales pada tahun 1542, disusul oleh Skotlandia pada tahun 1707, kemudian terbentuklah Britania Raya yang terdiri dari England, Skotlandia, dan Wales.¹³

2.2 Sejarah Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa.

Inggris menyampaikan permintaan untuk bergabung ke *European Community* pertama kali pada tahun 1961, namun permintaan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah negara Eropa khususnya Prancis.¹⁴

Inggris mengajukan permohonan kembali setelah Charles de Gaulle lengser, pada tahun 1967 pada masa kepemimpinan Edward Heath dari Partai Konservatif. Dan akhirnya perjuangan Inggris membuahkan hasil pada saat itu, permohonan Inggris diterima dan Inggris resmi bergabung dengan *European Community* pada 1 Januari 1973 bersama dengan Denmark dan Irlandia.¹⁵

2.3 Dinamika Hubungan Inggris dan Uni Eropa periode tahun 1975–2016.

Pada tahun 1975 adalah awal pertama kalinya

¹³ Ibid.,

¹⁴ Fidyah Faridah Kultsum dan Erlina Wiyanarti, "Dinamika Hubungan Inggris dan Uni Eropa" *E-journal UPI* (2014): hal 5.

¹⁵ Juan Carlos Ocana, Op.cit.

Inggris mengajukan *Referendum Brexit* setelah 2 tahun bergabung dengan Uni Eropa, yang pada saat itu hasilnya adalah Inggris harus tetap melanjutkan keanggotaannya di Uni Eropa, sejak tahun 1975 hubungan Inggris dan Uni Eropa mulai mengalami dinamika, dimana ada beberapa kebijakan Uni Eropa yang ditentang oleh Inggris karena berlawanan dengan kebijakan tersebut, beberapa diantaranya adalah seperti kebijakan: *European Rate and Exchange Mechanism* (EERM) pada tahun 1980, perjanjian Schengen (*Schengen Agreement*) pada tahun 1985, perjanjian Maastricht pada tahun 1992 yang untuk kedua kalinya direvisi menjadi bentuk: *Treaty Amsterdam* (1999) dan *Treaty of Nice* (2001),

Ketegangan Inggris dan Uni Eropa pun terus berlanjut pada saat penandatanganan perjanjian Lisbon pada tahun 2007, setelah ketegangan-ketegangan tersebut pada akhirnya Inggris pun kembali melakukan *Referendum Brexit* pada tahun 2016, yang melibatkan *voting* suara oleh masyarakat Inggris itu sendiri, dan hasilnya adalah Inggris keluar dari Uni Eropa, inilah yang menjadi alasan penulis untuk membahasnya dimulai dari tahun 1975 hingga tahun 2016.

BAB III KONSEKUENSI YANG HARUS DI HADAPI INGGRIS TERHADAP UNI EROPA PASCA REFERENDUM BREXIT

3.1 Permasalahan Yang Harus Dihadapi Inggris di Bidang Politik

Dampak *Brexit* terhadap Inggris dalam hubungan kebijakan luar negeri dan keamanan akan menjadi sebuah ketidakpastian,¹⁶ meskipun saat ini Inggris mampu menggabungkan aset kebijakan luar negeri Inggris dengan kebijakan Uni Eropa dalam mengejar tujuannya pada hubungan internasional.¹⁷

3.2 Permasalahan Yang Harus Dihadapi Inggris di Bidang Ekonomi

Salah satu keuntungan yang didapatkan Inggris saat masih bergabung dengan Uni Eropa adalah dibidang ekonomi khususnya, dimana Inggris yang merupakan salah satu anggota negara Uni Eropa bisa dengan bebas menikmati berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh Uni Eropa, pada bidang ekonomi.¹⁸

Latar belakang Inggris bergabung dengan Uni Eropa adalah karena kepentingan ekonomi,

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Electoral Commission press office, "Official Result of the EU Referendum is Declared," *Electoral Commission in Manchester* (2016) hal 3.

¹⁸ Denny Armandhanu, Op,cit.

mengingat Inggris bukan merupakan salah satu negara pendiri Uni Eropa, walaupun sebenarnya Inggris telah diundang untuk ikut mendirikan, Inggris baru bergabung dengan Uni Eropa ketika *European Community* mulai menunjukkan keberhasilan ekonomi.¹⁹ Walaupun Inggris banyak diuntungkan dari segi ekonomi, tercatat beberapa kali Inggris menyatakan keberatan terhadap kebijakan Uni Eropa karena dianggap terlalu memberikan kekuasaan bagi Uni Eropa dan juga merugikan Inggris, sehingga memunculkan keinginan bagi Inggris untuk memilih keluar dari Uni Eropa.

3.2.1. Dampak Keluarnya Inggris dari Uni Eropa terhadap Diplomasi

Keamanan Ekonomi Inggris

Dengan adanya krisis ekonomi yang menimpa Eropa, pertumbuhan ekonomi Eropa memang mengalami kemunduran. Hal tersebut merupakan salah satu alasan bagi Inggris ingin keluar dari UE. Namun, apakah dampak yang didapat Inggris jika keluar dari UE dan berarti juga keluar dari PTE jika Inggris keluar dari UE,²⁰

Selain hal itu, ekspor yang ditujukan pada negara-negara non-UE tersebut akan dikenakan tarif impor hingga mencapai 200% dan hal tersebut tentunya tidak menguntungkan Inggris

karena Inggris masih banyak bergantung pada negara-negara UE, sehingga jika Inggris keluar dari UE akan berdampak pada menurunnya GDP.

3.3. Permasalahan Yang Harus Dihadapi Inggris Terkait Masalah Irlandia Utara

UE menginginkan Irlandia Utara yang terpisah dari bagian Inggris yang lain, tetap mengikuti aturan pasar UE dengan menerapkan standar kualitas dan tarif yang sama meskipun nantinya sudah keluar dari UE, namun Perdana Menteri Inggris Theresa May tidak bisa menerima hal tersebut karena jika tidak ada kontrol di antara Irlandia dan Irlandia Utara, maka Inggris harus membuat batas pada laut Irlandia untuk mengecek barang-barang dan orang yang masuk ke pulau utama Inggris.²¹

May sendiri dapat memenuhi keinginan UE tersebut jika Inggris bisa mendapatkan perjanjian dagang baru dengan UE, ia mengatakan bahwa Inggris dan Uni Eropa dapat membuat perjanjian bea cukai sementara sampai akhir Desember 2021, namun negara-negara UE menolak karena mereka menginginkan perjanjian yang tidak memiliki batasan waktu. Inti perjanjian tersebut adalah

¹⁹ Annexes, Op, cit.

²⁰ Global Counsei, *Op.Cit.*,

²¹ Ibid.,

solusi untuk mencegah munculnya kembali perbatasan keras antara Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Inggris, dan Republik Irlandia, yang merupakan anggota UE.²²

3.4 Permasalahan Yang Harus Dihadapi Inggris Terkait Masalah Imigran

Pada saat Inggris bergabung dengan Uni Eropa maka secara paksa Inggris diwajibkan membuka pintu guna menampung para imigran sebagai dampak dari adanya kebijakan *Open Border Policy* yang di buat oleh Uni Eropa, ke-enam negara pendiri Uni Eropa (UE) yakni; Belgia, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat kemudian membuat aturan-aturan untuk memfasilitasi imigran yang berasal dari warga negara sesamanya,²³ aturan tersebut berada di bawah ketentuan *free movement of persons* (pergerakan bebas orang).

keluarnya Inggris dari Uni Eropa tentunya akan memberikan dampak negatif bagi Inggris, dan disini jumlah letak permasalahan baru yang harus dihadapi

Inggris pasca Referendum Brexit tersebut, dimana salah satu yang membuat Inggris memberikan akses Pasar Tunggal Eropa (PTE) merupakan karena adanya para imigran tersebut, jadi apabila Inggris memilih keluar dari Uni Eropa maka Inggris wajib melakukan re-negosiasi ulang terkait hubungan masa depannya agar tidak menjadi hambatan bagi keamanan negara nya kelak.

BAB IV NEGOSIASI HUBUNGAN DIPLOMASI KEAMANAN INGGRIS DAN UNI EROPA PASCA PERNYATAAN REFERENDUM BREXIT

Berdasarkan Pasal 50 (3) Traktat Lisbon, UK memiliki waktu selama dua tahun untuk melakukan negosiasi dengan Dewan UE dan menetapkan syarat atas penarikan dirinya. batas waktu tersebut dapat berubah bila UK dan UE menyetujui dengan suara bulat untuk memperpanjang batas waktu tersebut. Implikasi dari dilaksanakannya prosedur keluarnya UK sesuai dengan Pasal 50 (2) *Traktat Lisbon*,²⁴ yakni dengan menotifikasi keluarnya UK dari UE, adalah UK resmi menyatakan hak prerogatifnya untuk keluar dari UE dan dua tahun

²² MATAMATA POLITIK, "Brexit: Inggris dan Uni Eropa Selesaikan Status Perbatasan Irlandia," www.matamatapolitik.com/brexit-inggris-dan-uni-eropa-selesaikan-status-perbatasan (Diakses Pada 22 Mei 2019)

²³ Ivana Kottasova, "The Fact About Brexit and Immigration", <http://money.cnn.com/2016/06/21/news/economy/brexit-eu-referendum-immigration-facts/>, diakses pada 10 Juli 2019.

²⁴ Luis Simon, "Inggris, Uni Eropa dan masa depan Eropa: perspektif geostrategic," *Jurnal RIS*, (2015) : hal. 16-23.

setelah pernyataan tersebut maka UK resmi keluar.

4.1 Perjanjian Yang Dimuat Dalam Article 50 Lisbon

Pasal 50 dari perjanjian Uni Eropa merupakan salah satu butir ketetapan Uni Eropa yang berisi prasyarat prosedural penting untuk proses penarikan diri dari organisasi tersebut. Pasal 50 ini menetapkan empat langkah proses penarikan: keputusan untuk menarik diri; pemberitahuan tentang keputusan tersebut ke UE; negosiasi syarat penarikan; dan kesepakatan atas persyaratan yang dinegosiasikan. Adapun berikut poin-poin dari pasal 50 dari traktat Lisbon konstitusi UE, yaitu:²⁵

1. Setiap Negara Anggota dapat memutuskan untuk menarik diri dari Serikat sesuai dengan persyaratan konstitusinya sendiri.
2. Suatu Negara Anggota yang memutuskan untuk menarik diri harus memberitahukan kepada Dewan Eropa mengenai maksudnya, mengingat pedoman yang diberikan oleh Dewan Eropa.
3. Perjanjian-perjanjian tersebut akan berhenti berlaku untuk Negara yang bersangkutan sejak tanggal mulai berlakunya perjanjian penarikan

4. Untuk keperluan poin 2 dan 3, anggota Dewan Eropa atau Dewan yang mewakili Negara Anggota yang Penarikan tidak ikut serta dalam diskusi Dewan atau Dewan Eropa atau keputusan mengenai hal tersebut. Mayoritas yang memenuhi syarat harus ditetapkan sesuai dengan Pasal 238 (3) (b) Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa.

5. Jika suatu Negara yang telah ditarik dari Uni meminta untuk bergabung kembali, permintaannya tunduk pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

4.2. Bentuk Negosiasi Inggris Terhadap Uni Eropa di Bidang Politik

UE akan kehilangan pemain diplomatik utama dengan keluarnya Inggris, bersama Prancis, negara anggota yang paling mampu secara militer.²⁶ Untuk Uni Eropa, dampak paling besar dari *Brexit* pada bidang kebijakan luar negeri, keamanan dan pertahanan telah memberikan dorongan untuk gagasan untuk mereformasi kebijakan pertahanan Uni Eropa dan yang telah beredar untuk beberapa waktu. Serangkaian proposal telah dibuat untuk memperdalam kolaborasi pertahanan yang ada antara negara anggota Uni Eropa lainnya dengan tidak adanya Inggris.

²⁵ Julie Smith, Op.cit.

²⁶ Ibid.,

Keluar dari kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa akan membawa lebih banyak biaya signifikan bagi Inggris, *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) saat ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi Inggris dalam menangani berbagai masalah kebijakan dan keamanan luar negeri, melalui hubungan multilateral, dengan dua puluh tujuh negara Eropa lainnya.²⁷ Kerena Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki peran terbesar dimiliter setelah Prancis, Uni Eropa tentu akan kehilangan peran Inggris disini.

Adanya Brexit berarti Uni Eropa kehilangan suara Inggris dalam menetapkan agenda pada pembangunan kebijakan, diplomasi lingkungan internasional, keamanan internal dan kebijakan perdagangan. Sebaliknya, Inggris juga akan kehilangan kemampuan untuk berkembang dalam tujuan kebijakan luar negeri nasional melalui Uni Eropa dan kekuatan di masing-masing daerah.

4.3. Bentuk Negosiasi Inggris dengan Uni Eropa Pasca Brexit Terkait Keamanan Ekonomi

Dalam bidang ekonomi terlihat paling jelas permasalahan terhadap kebijakan perdagangan,

²⁷ Vincen, "Brexit atau Bremain?: Apa masa depan untuk Strategi Diplomasi Eropa Inggris," *Jurnal Internasional*, (2016) : hal.27-34.

sementara Inggris akan mudah untuk melakukan transaksi perdagangan berdasarkan prioritas domestik dan akan menjadikan Uni Eropa pilihan kedua beserta negara-negara lain.²⁸ Inggris mendapatkan jaminan tidak akan dibedakan meskipun berada di luar negara-negara yang menggunakan mata uang *Euro* atau *Eurozone*,²⁹

Sebagai imbalannya, Inggris berjanji tidak akan menghambat integrasi *Eurozone* yang lebih jauh. Jika Inggris berhasil merundingkan kelanjutan akses ke pasar tunggal UE berdasarkan perlakuan khusus maka kesepakatan ini kemungkinan besar tidak akan memasukkan pengamanan non-diskriminatif.

4.4 Bentuk Negosiasi Inggris dengan Uni Eropa Pasca Brexit Terkait Keamanan Isu Imigran

Beberapa aktivis dari kubu pendukung *Brexit* juga berpendapat sama dengan ketiga menteri tersebut. Mereka mengatakan bahwa semua hak imigran untuk datang, tinggal, dan bekerja di Inggris tidak akan diberikan

²⁸ Peter van Ham, *Brexit: konsekuensi strategis untuk Eropa: studi skenario*, (The Hague: Clingendael, 2016), hal. 21-25.

²⁹ Hiper15, "The Brexit: Kekecewaan Inggris terhadap Uni Eropa," www.hiper15.com/2016/06/11/the-brexit-kekecewaan-inggris-terhadap-uni-eropa (Diakses Pada 23 Mei 2019)

akses kebebasan seperti sebelumnya.³⁰

Akan dilakukan seleksi terhadap para imigran dan memastikan semua imigran yang masuk ke Inggris harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Dalam hal ini Inggris akan membuat kebijakan agar lebih selektif dalam seleksi imigran yang akan masuk ke Inggris.

4.4.1 Poin-poin Kerjasama Yang Dinegosiasikan

1. Memberikan kepastian dan kejelasan-Inggris akan berusaha memberikan kepastian dimanapun mereka bisa saat mendekati proses negosiasi.
2. Mengambil alih hukum sendiri-pemerintah Inggris akan evaluasi konstitusi mereka dan mengakhiri yurisdiksi Pengadilan Keadilan Uni Eropa di Inggris.
3. Memperkuat Serikat-Inggris akan menjamin kesepakatan yang berlaku untuk seluruh Inggris-Skotlandia, Wales, Irlandia Utara dan seluruh wilayah Inggris. mereka tetap berkomitmen penuh terhadap Perjanjian Belfast dan penerusnya.
4. Melindungi hubungan yang kuat dan bersejarah dengan Irlandia dan memelihara *Common*

*Travel Area*³¹- Mereka akan berupaya memberikan solusi praktis yang memungkinkan untuk pemeliharaan *Common Travel Area*, sekaligus melindungi integritas sistem imigrasi kami dan melindungi ikatan kuat dengan Irlandia

5. Mengendalikan imigrasi – mereka akan mengendalikan jumlah warga negara Uni Eropa yang datang ke Inggris.
6. Melindungi hak-hak pekerja-mereka akan melindungi dan meningkatkan hak-hak pekerja yang ada.
7. Memastikan perdagangan bebas dengan pasar Eropa-mereka akan menjalin kemitraan strategis baru dengan UE, termasuk kesepakatan perdagangan bebas yang luas, berani dan ambisius, dan akan mencari kesepakatan bea cukai baru yang saling menguntungkan dengan UE.
8. Mengamankan perjanjian perdagangan baru dengan negara lain-mereka akan menjalin hubungan perdagangan bebas di seluruh dunia.
9. Bekerja sama dalam memerangi kejahatan

³⁰ Ibid.,

³¹ Jurnal: Westminster Adviser. "The Theresa May government: New era, new agenda, new politics?". UK. 2016

dan terorisme—mereka akan terus bekerja sama dengan UE untuk melestarikan keamanan Eropa, memerangi terorisme, dan untuk menegakkan keadilan di seluruh Eropa.

BAB V KESIMPULAN

Keluarnya Inggris dari UE tentu memberikan dampak negatif kepada Inggris sendiri, sehingga Inggris perlu untuk menyusun atau menata kembali kebijakan politik luar negerinya, termasuk melakukan negosiasi untuk tetap menjalin hubungan dengan UE, meskipun tidak lagi berstatus sebagai negara anggota UE. Selama 2 tahun ini.

Terkait Aspek Politik adalah, Bentuk negosiasi yang dilakukan adalah Inggris harus memastikan bahwa kemampuan diplomatik dan militernya sejalan dengan UE agar memudahkan Inggris untuk tetap bekerjasama dengan UE.

Aspek Ekonomi adalah, bentuk negosiasi yang dilakukan adalah dengan melakukan perundingan ulang di Brussels, Belgia dengan ketentuan syarat yang telah dimuat dalam *Article 50 Lisbon Treaty*.

Aspek Perbatasan Irlandia Utara, bentuk negosiasinya adalah Inggris dan UE akan memasuki wilayah pabean bersama yang akan membebaskan

kebutuhan pemeriksaan pabean antara Republik Irlandia, dan Irlandia Utara.

Aspek Sosial terkait isu imigran, bentuk negosiasi yang dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan UE terkait akses pasar tunggal Inggris, akses ini diberlakukan dengan tujuan untuk membatasi jumlah para imigran yang ingin tinggal dan bekerja di Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

Allison, George. "Study finds UK is second most powerful country in the world," *UK Defence Journal* (2014).

Biscop, Sven. "Inggris dan pertahanan Eropa: memimpin atau meninggalkan?," *Jurnal Internasional*, (2012).

Vincen, "Brexit atau Bremain?: Apa masa depan untuk Strategi

Waltz, Kenneth N. "Realist Thought and Neorealist Theory", *Journal of International Affairs* (1990).

Waltz, Kenneth N. "Realist Thought and Neorealist Theory", *Journal of*

- International Affairs* (1990).
- Whitman, Richard G. "Soft atau Hard Brexit' Commentary," *Pusat Kebijakan Eropa*, (2016).
- BUKU:**
- Aggestam, Lisbeth. *kebijakan luar negeri Eropa dan pencarian untuk peran global: Inggris, Perancis dan Jerman*, (London: Routledge, 2013).
- _____, Ole, W. dan de Wilde, J. *Security: A New Framework For Analysis*. (Boulder: Lynne Rienner, 1998).
- Deasy, Nuraeni. *Regionalisme: Dalam Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ferguson, Niall, "Empire: The rise and demise of the British world order and the lesson for global power" (New York: Basic books, 1998).
- Forster, Anthony. *The making of Britain's European foreign policy* (London: Longman, 2002).
- Gaskarth, Jamie. *British foreign policy: crises, conflicts and future challenges*, (Cambridge: Polity, 2013).
- Hadi, Andri. *Politik LuarNegeri Indonesia: Prospek dan Tantangan dalam EraGlobalisasi*. (Jakarta: dirjen IDP Departement Luar Negeri RI, 2009).
- Ham, Peter van. *Brexit: konsekuensi strategis untuk Eropa: studi skenario*, (The Hague: Clingendael, 2016).
- Heidi Burgess, *Shuttle Diplomacy*, (Cambridge University, 2003).
- Holsti, K.J. *International Politics: A Framework for Analysis*, (New Delhi: Prentice Hall, 1978).
- _____, *Politik Internasional Kerangka untuk analisis*.

- (Jakarta: Erlangga, 1988).
- Smith, Julie. *bilateralisme baru: hubungan bilateral Inggris dalam Uni Eropa* (London: Royal Institute, 2002).
- Sukawarsini, *Diplomasi antara teori dan praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Sylva Bankobeza, *International Enviromental Diplomacy and Negotiations* (Cambridge University, 2002).
- KORAN dan MAJALAH:**
- “Brexit’ dan Gejolak Pasar Global,” Kompas, diakses pada 21 September 2018.
- “Inggris Tentukan Masa Depan,” Kompas, diakses pada 21 September 2018.
- Jankowiak, Celine. “Brexit’ feeds European populists’ ambitions of power,” *The Jakarta Post*, diakses pada 21 September 2018.
- Macshane, Denis. “The three ‘Brexit’ fractures,” *The Jakarta Post*,

diakses pada 21 September 2018.

WEBSITE:

- Boyle, Catherine. “just what is the UK’s problem with Europe?,” *CNBC*, <https://www.cnbc.com/2015/05/27/why-would-the-uk-want-to-leave-the-eu.html>. (diakses pada 14 February 2019).
- Citizen Information, “Common Travel Area between Ireland and the United Kingdom,” *Citizenship*, http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_abroad/freedom_of_movement_within_the_eu/common_travel_Association_between_ireland_and_the_uk.html (diakses pada 12 Maret 2019).
- Deacon M, “Britain's 40 year relationship with the EU”. *the telegraph*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.telegraph.co.uk/politics/2016/06/16/britains-40-year-relationship-with-the->

- eu/amp/(diakses
pada 18
September
2018).
- D, Safitri. “Gambaran
Pasar Uni
Eropa”,
*Indonesia
mission*,[http://w
ww.indonesianm
ission-
eu.org/website/p
age4248200982
0050805595606
8.asp#1](http://www.indonesianmission-
eu.org/website/page4248200982
0050805595606
8.asp#1) (diakses
pada 19
September
2018).